

OMBUDSMAN BABEL TERIMA KUNJUNGAN INSPEKTORAT BANGKA BARAT TERKAIT PENILAIAN KEPATUHAN

Selasa, 26 Maret 2024 - kepbabel

Pangkalpinang - Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bangka Belitung menerima kunjungan Inspektorat Bangka Barat yang diwakili Subkoordinator Penyusunan Program beserta tim. Pertemuan tersebut dalam rangka penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman yang akan ditindaklanjuti dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah bertempat di Kantor Ombudsman Babel, Senin (25/3/2024).

Dalam kunjungan ini, Koordinator Penyusunan Program Inspektorat Bangka Barat, Anna menjelaskan bahwa saat ini Inspektorat Bangka Barat rutin melakukan pendataan penilaian kepatuhan Ombudsman untuk bahan perencanaan pembangunan daerah. "Tentu hasil penilaian ini menjadi bahan kami sampaikan kepada Bappeda, tentu harus memperhitungkan berbagai kondisi keuangan daerah dalam melakukan pemenuhan standar pelayanan publik yang berkualitas. Namun, Pemkab Bangka Barat memiliki komitmen atas perbaikan dan peningkatan pelayanan publik," ujar Anna.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman Babel, Agung Nugraha yang menerima kunjungan tersebut menyampaikan bahwa hasil penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Kabupaten Bangka Barat mengalami penurunan pada tahun 2023, hal ini tentu bisa menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam menindaklanjuti kekurangan tersebut, terutama Dinas Pendidikan dan Puskesmas Simpang Teritip.

Ombudsman Babel berharap pendataan penilaian Kepatuhan tiap tahunnya dilaksanakan oleh Pemkab Bangka Barat dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap proses perencanaan pembangunan. Hal ini tentu menjadi harapan bersama, terlebih lagi penilaian kepatuhan akan mempengaruhi pada penilaian lainnya, dari Bapennas, Kemendagri, dan Kemenpan RB.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Babel, Shulby Yozar Ariadhy mengungkapkan bahwa Kabupaten Bangka Barat merupakan satu-satu pemerintah daerah yang masuk Zona Kuning dalam penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kepulauan Bangka Belitung. "Kami berharap ada komitmen kepala daerah yang luar biasa pada penilaian tahun ini, tentunya besar harapan kami semua pemerintah daerah berada pada Zona Hijau," tutup Yozar.